

BAB V

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN TENTANG PARTISIPASI PIHAK YAYASAN DAN KEPALA SLTP SWASTA DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

Dari uraian temuan penelitian lapangan sebagaimana diungkapkan di atas, pada dasarnya terdapat tiga hal pokok menyebabkan program wajib belajar masih menyisakan masalah antara lain: (1) masih terdapat anak mengulang kelas, (2) masih ada anak putus sekolah, (3) dominasi kekuasaan yayasan dengan melakukan intervensi sampai pelaksanaan kegiatan pengajaran. Persoalan pertama dan kedua telah diberikan solusi oleh sekolah sampel dengan strategi masing-masing. Akan tetapi kualitas kinerja ditemukan belum optimal disebabkan berbagai faktor seperti kualitas tenaga pelaksana wajar dikdas atau masalah krusial pendanaan. Sedangkan persoalan ketiga (intervensi) masih menyimpan sejuta pertanyaan.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka pada bagian ini dilakukan analisis sesuai dengan fokus masalah penelitian tentang partisipasi pihak yayasan, kepala sekolah dan pelaksanaan wajib belajar di SLTP Negeri Kota Bandung.

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dilihat dari Partisipasi Penyelenggara (Pimpinan Yayasan)

Sesungguhnya wajib belajar diartikan sebagai kewajiban bagi setiap warga negara untuk menyekolahkan anaknya pada usia tertentu di jenjang

pendidikan tertentu. Wajib belajar tingkat SLTP berarti suatu kewajiban bagi setiap warga negara untuk menyekolahkan anaknya yang berusia 13-15 tahun di SLTP sampai tamat. Dilihat dari tujuan utamanya adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara khusus wajib belajar SLTP bertujuan untuk mewujudkan hak memperoleh pelayanan pendidikan dasar bagi setiap warga negara yang berusia 13-15 Tahun sesuai ketentuan yang dituangkan dalam PP. 28 Th. 1990 dan UU. No. 2 Th. 1989, ~~terdapat~~ dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar;
- b. Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat;

Memaknai ketentuan hukum di atas, pekerjaan yayasan pendidikan swasta amat berat di samping harus memenuhi tuntutan pemerintah juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Pada bagian ini sengaja dikupas secara berurutan hasil penelitian lapangan berkaitan dengan partisipasi ketua yayasan dalam kelompok berikut.

Yayasan Badan Perguruan Indonesia (BPI) yang didirikan berdasarkan akte pendirian No. 2 Tgl 10 Januari 1950 yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan mandiri sekolah SLTP BPI berdasarkan SK Depdiknas No. 274/I02.4/282. Tanggal 7 Pebruari 1082 dengan nomor statistik 2002210086,

akreditasi disamakan telah berupaya mewujudkan sekolah berkualitas. Dengan luas tanah 5.350 M2 yang telah disertifikat memiliki 20 ruang, yang terdiri dari 11 ruang belajar, 3 laboratorium, masing 1 ruang pustaka, keterampilan dan serba guru. Kemudian disediakan juga ruang guru, kepala sekolah, osis, BP dan kamar kecil lainnya. Dari fasilitas ini membuktikan kesungguhan yayasan untuk menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan berkualitas.

Di samping itu, partisipasi aktif yang diketahui dari yayasan ini adalah upaya menyediakan dana pendidikan yang relatif memadai. Keunggulan lain justru menyediakan dana program wajib belajar terutama dalam digunakan untuk merealisasikan program gairah belajar, seperti pemberian bea siswa. Kemudian dialokasikan untuk program mengulang kelas, putus sekolah dan ramah lingkungan melalui aktivitas gotong royong membersihkan lingkungan sekolah.

Pihak yayasan SLTP BPI memperlihatkan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, kendati dengan mengintervensi ke dalam sektor teknis seperti dalam proses merekrut tenaga guru, akan tetapi hasil rekrutmen dapat memilih calon guru terbaik berdasarkan IPK dengan spesifikasi sarjana pendidikan sesuai kebutuhan pengajaran. Dalam konteks peningkatan mutu ada baiknya intervensi, namun untuk kepentingan pengembangan suasana demokrasi merupakan batu sandungan mewujudkan transparansi. Sementara Abin Syamsuddin Makmun (2000 : 9) melihat bahwa bentuk partisipasi yang efektif dinilai dari peran sekolah sebagai sistem yang terbuka. Dalam pandangan

tergambar adanya nuansa demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan sistem terbuka. Pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut adalah mungkinkah pihak yayasan memegang prinsip keterbukaan 100%? Teramat sulit rasanya sebab tujuan pendirian lembaga pendidikan di samping alasan kemanusiaan juga tersimpan misi bisnis.

Begitu juga pada Yayasan Mardiwidjana yang didirikan berdasarkan akte pendirian No. 3 Tanggal 14 Agustus 1958 dengan usaha dalam sektor pendidikan mendirikan lembaga pendidikan bernama SLTP Santo Aloysius I berdasarkan SK Kanwil Depdiknas No. 33735/Subs. Tgl 22 September 2000 dengan nomor sekolah 20002210014, akreditasi disamakan sesuai SK No. 2415/I02/Kep/MN/2000. Tanggal 28 Oktober 2000 memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap kualitas pendidikan.

Penilaian cukup efektif diberikan atas partisipasi ketua yayasan Mardiwidjana dalam melaksanakan program wajib belajar di sekolah ini didasari berbagai pertimbangan antara lain: (1) dukungan dana terhadap program gairah belajar, mengulang kelas, putus sekolah dan ramah lingkungan. Dana yang disediakan dalam jumlah relatif besar dibedakan dari dana kegiatan pengajaran lainnya. Dalam pandangan J G. Mason (1992 : 14) disebutkan bahwa kepekaan terhadap masalah dengan memberikan solusi, termasuk menyediakan dana merupakan bukti partisipasi yang efektif. Temuan pada SLTP Santo Aloysius membuktikan partisipasi yayasan setempat sangat tinggi dalam menjalankan program wajib belajar. Di samping menyediakan dana program juga



menyediakan untuk keperluan honorer tenaga pelaksana yang dianggarkan setiap tahun, sedangkan besarnya disesuaikan dengan peran dan fungsi masing-masing anggota berdasarkan rapat teknis antara pihak yayasan dengan pimpinan sekolah, (2) perhatian yang cukup tinggi terlihat pula dari kesungguhan membangun berbagai fasilitas belajar, di mana saat ini tersedia 14 ruang belajar, ditambah 3 RKB dalam tahap penyelesaian dan didukung ruang labor, pustaka, serba guna, UKS, praktek komputer dan ruang guru lainnya.

Yayasan ini membayar tenaga honor sebanyak 5 (lima) orang dengan besar honorer antara Rp. 250.000,00 s/d Rp. 750.000,00 perbulan, sedangkan guru yang ditetapkan berdasarkan SK yayasan sebanyak 64 orang yang memiliki spesifikasi sarjana pendidikan dengan lapis disiplin ilmu sesuai mata ajar dan tugas-tugas kependidikan lainnya. Kesra guru honorer diberikan sebesar Rp.36.000,00, sedangkan kesra guru definitif dan pegawai lainnya dianggarkan sebesar Rp. 1.680.000,00 /caturawulan. Jasa angkutan disediakan dana sebesar Rp. 4.764.000,00 /tahun diluar biaya minyak dan kerusakan. Sangat rasional bila sekolah ini menjadi pilihan bagi anak usia 13-15 tahun, hanya saja yang membatasi justru misi sekolah kristiani dapat mempersempit ruang gerak anak-anak dari kelompok muslim.

Yayasan YPDM Pasundan didirikan atas akte pendidikan No. 69 Tanggal 9 Oktober 1990 bergerak dalam bidang usaha pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan SLTP berdasarkan SK Kanwil Depdiknas No. 135427/B.1 Tanggal 24 Desember 1958 dengan nomor sekolah 2002210015 status diakui

berdasarkan SK Akreditasi No. 60/I02.07/Kep/ot/1997. Tanggal 20 Januari 1997 memiliki sejumlah bangunan dengan luas tanah bukan milik adalah 2.950 M2. Jika diperhatikan secara detail, partisipasi yang diketahui dari kinerja yayasan diselimuti bisnis. Artinya nuansa bisnis membungkis rasa kemanusiaan yang mengabaikan anak mengulang kelas dan putus sekolah. Apatah lagi bila ada anak dilingkungan sekolah yang tidak mengenyam pendidikan tingkat SLTP. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan alasan teoretis dikemukakan bahwa partisipasi Yayasan YPDM Pasundan belum efektif dalam melaksanakan proqram wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Berdasarkan paparan temuan lapangan dimana pihak yayasan YPDM Pasundan belum mengalokasikan dana untuk kegiatan mengulang kelas, putus sekolah atau ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kebutuhan, ditambah aspek lain yang terabaikan membuat penilaian dinyatakan belum efektif. Ada alasan yang memperkuat penilaian tersebut antara lain: *Pertama*, anak rawan mengulang kelas dan putus sekolah diprediksi meningkat, sedangkan angka anak bermasalah merangkak naik merupakan bukti ketidakseriusan pihak sekolah melaksanakan program wajib belajar. Semua ini ternyata disebabkan oleh sikap dan kepedulian yayasan yang kurang memperhatikan kesejahteraan guru. Kendati terdapat alasan raional dari pihak yayasan dengan alasan klasik krisis ekonomi, namun penerimaan dari sektor iuran siswa relatif besar, hanya saja belum didistribusikan untuk kepentingan pelayanan profesional. Idhoci Anwar (1990 : 63) menyarankan agar pengeluaran biaya dalam organisasi harus

menjawab kebutuhan personil, karena berdampak bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kedua, rendahnya kinerja sekolah disebabkan partisipasi yayasan rendah pula dalam memberikan dedikasi, menanamkan sikap bersaing merebut siswa di kalangan pegawai sekolah dan kejujuran yang semakin menipis di kalangan personil sekolah. M. Feinberg (1990 : 32-34) menjelaskan bentuk partisipasi yang efektif dilihat dari: (a) pengabdian seluruhnya yang diberikan dalam melaksanakan tugas, (b) memotivasi agar bawahan memiliki sikap bersaing secara sehat, (c) menanamkan kejujuran di kalangan pelaksana, atau setidaknya merekrut tenaga kependidikan yang jujur berdasarkan test kepatutan dan kelayakan, (d) memberdayakan kekuatan sebagai potensi internal, (e) memberdayakan tenaga potensial untuk program-program inovasi.

Analisis selanjutnya diarahkan untuk menilai partisipasi Yayasan Salib Suci di Jalan Van Deventer No. 18 Kebun Pisang Bandung Wetan yang didirikan berdasarkan akte pendirian No. 107 Tanggal 27 Juli 1962 tergolong dalam kelompok yayasan MNPk bergerak dalam bidang usaha pendidikan. Sebagai wujud usaha mendirikan sekolah bernama SLTP Yos Sudarso berdasarkan SK Kanwil Depdiknas No. V/106/486 Tanggal 1 Agustus 1962 dengan nomor sekolah 2002210020. Saat ini telah berstatus disamakan berdasarkan SK akreditasi No. 05/1027/Kep/PP/1998 Tanggal 8 Januari 1998. Sekolah yang dilaksanakan pada pagi hari memiliki luas tanah 2005 M² milik sendiri yang telah disertifikatkan. Di sini terdapat 7 (tujuh) ruang kelas, 1 labor biologi, ruang

pustaka, ruang praktek komputer serta ruang lainnya, seperti BP, guru, kepala sekolah dan WC.

Menurut kajian teoretis terdapat kelemahan pihak yayasan dalam menyelenggarakan pendidikan, apatah lagi dikaitkan dengan pelaksanaan program wajib belajar. Ada beberapa temuan yang memberikan penilaian sehingga partisipasi yayasan salib suci belum efektif antara lain:

1. Masih banyak anak mengulang kelas dan putus sekolah merupakan bukti partisipasi mereka rendah. Akan tetapi bila mereka serius memperhatikan masalah ini tentunya bentuk solusi penyediaan dana, penempatan tenaga profesional dan pemberian kesra menjadi bagian utama yang tidak terpisahkan. Dalam kenyataannya, pihak yayasan sepertinya mengabaikan hal-hal itu, padahal potensi sumber dana sangat besar, dan sebagai masyarakat sekitar sudah dijadikan donatur sekolah. Manajemen yang tertutup membuat pihak-pihak sekolah merasa ketakutan untuk mengusulkan program-program baru, apalagi berkaitan dengan masalah keuangan, kerana "belum apa-apa" terlontar kata krisis ekonomi. Lipsey (dalam Idhoci Anwar, 1990 : 53-54) memberikan masukan, bahwa faktor ekonomi dapat mewujudkan manajemen yang efektif, karena ada empat alasan logis yakni: (a) ekonomi dapat menjelaskan tingkah laku yang sesungguhnya, (b) ekonomi dapat meramalkan perubahan, (c) ekonomi membantu pengambilan keputusan yang terbaik, dan (d) ekonomi merupakan sumber pemberdayaan sumber-sumber yang langka.

2. Sekolah kurang diminati sebagai muara dari penerapan disiplin kaku dan hanya mementingkan pencapaian tujuan sekolah, sedangkan tujuan anak usia 13-15 Tahun sebagai peserta wajib belajar ditempatkan pada posisi dibalik bingkai bisnis. Bila tujuan kemanusiaan tentunya meningkatkan pelayanan profesional atau membangun infrastruktur agar sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu. Muara keinginan masyarakat sudah bergeser bukan "asal sekolah" melainkan bersekolah di tempat berkualitas. Nah paradigma ini harus dijadikan peluang strategis untuk merebut pangsa pasar yakni para siswa usia 13-15 tahun dan program inovasi harus digulirkan dengan segera. Djam'an Satori (2001 : 3-5) menjelaskan bahwa inovasi bukan saja dilakukan oleh pusat, melalui MBS, peran serta masyarakat dapat ditingkat guna menjawab kebutuhan mutu anak didik, namun yang amat penting adalah bagaimana sekolah mampu menanamkan kepedulian masyarakat pemakai dan pengguna jasa pendidikan sebagai wujud inovasi baru.

Pada Yayasan Atikan Sunda (YAS) diketahui partisipasi ketua yayasan cukup mengembirakan, namun budaya "sungkan berlebihan" menyebabkan pihak yayasan mengikuti pola lama yang dijadikan tradisi turun temurun. Ketua yayasan sekaligus merangkap sebagai kepala sekolah ternyata memberikan arti penting dalam merekrut siswa. Tiga tahun terakhir siswa masuk sekolah ini membludak karena dimulai dari promosi besar-besaran. Yayasan Atikan Sunda didirikan berdasarkan akte pendirian No. 132/I002 Tanggal 19 September 1955

dengan pendirian SLTP berdasarkan izin Kanwil Depdiknas No. 145/I02.Kep/E.77 Tanggal 14 Desember 1977 telah diakreditasi dengan status "diakui" berdasarkan SK No. 1002/I02/KP/MN/2000 Tanggal 6 Maret 2000. Ketua yayasan memiliki komitmen cukup tinggi untuk menempatkan sekolahnya sebagai tujuan utama anak tamatan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Kota Bandung.

Kendati perhatian cukup tinggi untuk melaksanakan program wajib belajar, namun bila dihubungkan dengan persoalan teknis masih menyisakan masalah wajib belajar yang sangat klasik. Ketua yayasan yang merangkap kepala sekolah ternyata menghambat ruang gerak tenaga kependidikan lainnya untuk melakukan inovasi. Manajemen yang tertutup membuat kegiatan sekolah diselimuti konflik internal yang diprediksi pada suatu saat akan menimbulkan masalah besar dan bahaya latin ini mulai muncul kepermukaan seiring dengan perasaan dengki. Berdasarkan berbagai dimensi dan aspek yang dinilai maka secara umum partisipasi ketua yayasan dalam melaksanakan program wajib belajar belum efektif seperti dibandingkan dengan teori dan landasan hukum. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, khususnya pasal 10 dijelaskan tentang yayasan yakni:

- Ayat (2). Dalam hal pendirian yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.
- Ayat (3) Dalam surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Bila pihak Yayasan Atikan Bandung memegang wasiat agar melaksanakan kegiatan pendidikan tentunya seluruh kewenangan manajemen menjadi kewajiban pemegang wasiat. Namun dalam suasana dimana angin reformasi dan demokrasi sedang gencar ditiupkan, maka model manajemen yang diterapkan tersebut tentunya tidak relevan lagi dan menurut prediksi sementara, secara perlahan sekolah ini akan ditinggal oleh tenaga pendidik dan selanjutnya diikuti oleh siswa. Rudi Indrajaya (2001 : 5) menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan selanjutnya adalah Yayasan Pendidikan Pelita Nasional (YPPN) dengan akte pendirian No. 10 Tanggal 6 Oktober 1983 mengembangkan usahanya dalam bidang pendidikan dengan mendirikan SLTP Pelita sesuai SK Kanwil Dediknas No. V/202/596 Tanggal 19 Desember 1969. Saat ini sekolah tersebut berstatus "diakui" berdasarkan SK Akreditasi No. 1002/I02/KP/MN/200 Tanggal 6 Maret 2000 memiliki tanah seluas 1.500 M², sertifikat milik sendiri. Ruang kelas hanya 9 ruang ditambah ruang serba guna, komputer dan ruang kepala sekolah, guru lainnya. Terdapat juga rumah penjaga sekolah yang dibangun berdampingan dengan gedung utama (ruang belajar).

Partisipasi Yayasan Pendidikan Pelita Nasional (YPPN) Bandung dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun masih memiliki kelemahan tertentu, sebab ada agenda wajib belajar yang semestinya

dilaksanakan sebagai mitra kerja pemerintah ternyata tidak dilaksanakan. Berkaitan dengan ini disimpulkan secara umum bahwa partisipasi yayasan pelita dikategorikan belum efektif. Sejumlah alasan dikemukakan guna mendasari penilaian tersebut meliputi:

1. Kurangnya perhatian untuk menetapkan anggaran sesuai kebutuhan pendidikan, termasuk dalam mengatasi masalah mengulang kelas dan putus sekolah disebabkan ketua yayasan memfokuskan untuk menambah ruang belajar. Sampai penelitian ini dilakukan penambahan gedung baru tidak pernah ada dan sepertinya sebuah janji agar semua tenaga pendidik bersungguh-sungguh melaksanakan tugas, karena periode yang akan datang sekolah menambah jumlah siswa. Sebenarnya janji-janji tidak perlu ada, bila masalah mengulang kelas dan putus sekolah tetap membengkak, sebaiknya melakukan pendekatan dengan GN-OTA seperti disebutkan Inten Soeweno (1997 : 66-67) bahwa masalah wajib belajar dapat diatasi dengan mengirimkan data otentik kepada GN-OTA untuk selanjutnya dicarikan orang tua asuh. Menyikapi pernyataan tersebut pihak yayasan sebaiknya harus merebut peluang orang tua asuh sebagai solusi mengatasi persoalan di sekolah ini, bila konsentrasi diarahkan untuk membangun ruang kelas baru atau ruang praktek.
2. Nilai akhir dalam bentuk NEM ketika siswa masuk di SLTP Pelita dengan rata-rata 4,5 dari jumlah yang diperoleh sebesar 27,00 yang meliputi 5 (lima) mata pelajaran yang diuji menjadi 5,0 dari jumlah 6 (enam) mata pelajaran

diuji pada akhir kelas II, artinya jumlah rata-rata NEM siswa tahun 2001/2002 sebesar 30,00. Angka-angka ini menggambarkan lemahnya kinerja manajemen sekolah dan belum ada kepedulian pihak yayasan melihat rata-rata NEM yang sangat memprihatinkan tersebut. Ada baiknya dikutip pandangan Firman B. Aji dan Martin. S (1990) untuk menjawab persoalan di atas sebagaimana ditegaskan bahwa di dalam sistem proyek, terdapat tiga kegiatan utama seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang diaplikasikan secara efektif melalui koordinasi yang baik dapat mewujudkan hasil yang baik pula bagi organisasi. Setiap unsur selalu dilibatkan sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan berdasarkan kepentingan. Konotasi dalam hal ini mendapat kupasan lebih lanjut bahwa pihak yayasan harus memulai penataan fungsi dan tanggung jawab, sehingga semua unsur melibatkan diri untuk meningkatkan hasil akhir siswa (NEM) berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B. Efektivitas Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dilihat dari Partisipasi Kepala SLTP Swasta

Analisis pada bagian ini diarahkan untuk menilai efektivitas pelaksanaan wajar dikdas dilihat dari partisipasi yang dilakukan kepala sekolah. Sebelum melangkah lebih lanjut, landasan teori yang menekankan efektivitas kembali disorot seperti dijelaskan Steers (1985 : 44) bahwa efektivitas dipandang dari sudut pencapaian sasaran pada tingkat umum, atau terjadinya peningkatan prestasi, terwujudnya kepuasan kerja dan keterlibatan secara aktif.

Jika dihubungkan dengan partisipasi kepala SLTP BPI I yang telah menyusun rencana wajib belajar dan telah melakukan berdasarkan program kerja, seperti adanya program gairah belajar, program mengulang kelas dan program putus sekolah memberikan pertanda bahwa partisipasi tersebut dikategorikan cukup efektif. Alasan mendasar antara lain: *Pertama*, teori efektivitas menjelaskan tolok ukur pekerjaan efektif adalah prestasi yang dicapai, terdapat kepuasan, dan keterlibatan pihak berkepentingan. Indikasi lain yang menentukan efektif tidaknya pelaksanaan program adalah tepat sasaran, (Gibson, 1994 : 249). Partisipasi kepala SLTP BPI I telah berhasil mengatasi masalah putus sekolah, sejak lima tahun terakhir dinyatakan "nihil". Dilihat dari jumlah siswa sebanyak 772 orang berarti kepala sekolah berhasil mengatasi masalah putus sekolah, sementara partisipasi mencegah tinggal kelas ternyata menghasilkan penurunan angka dari 5 (lima) anak menjadi 4 (empat) orang dari tahun sebelumnya.

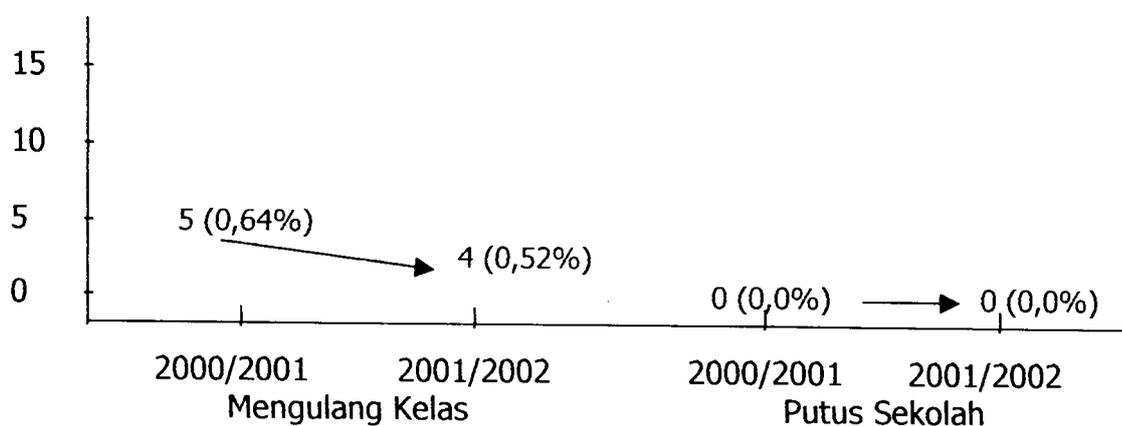
Kedua, penilaian cukup efektif diberikan karena kepala sekolah SLTP BPI I melaksanakan agenda wajib belajar dengan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menggairahkan motivasi belajar siswa, mencegah tinggal kelas dan putus sekolah atau program ramah lingkungan, seperti menjaga kebersihan sekolah. Artinya bila efektif dikatakan tepat sasaran, maka pelaksanaan program-program ini merupakan indikasi kegiatan wajib belajar yang efektif, karena sekolah menyiapkan sistem pembelajaran yang kondusif sebagai prakondisi mewujudkan situasi belajar mengajar yang menyenangkan. Djauzak

Ahmad (1993 : 1) menyebutkan bahwa kewajiban belajar merupakan hak anak untuk menikmati pendidikan melalui sistem pelayanan profesional sehingga anak-anak ini dapat menyelesaikan program sampai tamat.

Ketiga, Apa yang diketahui dari partisipasi kepala SLTP BPI I tentang efektivitas implementasi program wajib belajar menunjukkan bahwa tersedia laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan aplikasi program, terutama berkaitan dengan kegiatan pokok: (1) gairah belajar, (2) mengulang kelas, (3) putus sekolah, dan (4) ramah lingkungan. Persentase angka mengulang kelas dan putus sekolah dituangkan dalam gambar 7, sedangkan peningkatan NEM yang dicapai siswa SLTP BPI I seperti dituangkan dalam tabel 7 menggambarkan kenaikan yang sangat menggembirakan, karena dari kajian selanjutnya dapat dinilai efisien.

Gambar 7

Persentase Mengulang Kelas dan Putus Sekolah
Siswa SLTP BPI I Bandung



Sumber : Hasil analisis peneliti, 2002

Partisipasi kepala SLTP Santo Aloysius dalam melaksanakan program wajib belajar juga dinilai cukup efektif. Penilaian ini diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa partisipasi efektif diketahui dari ketepatan kepala sekolah melaksanakan seluruh rangkaian program wajib belajar sesuai rencana.

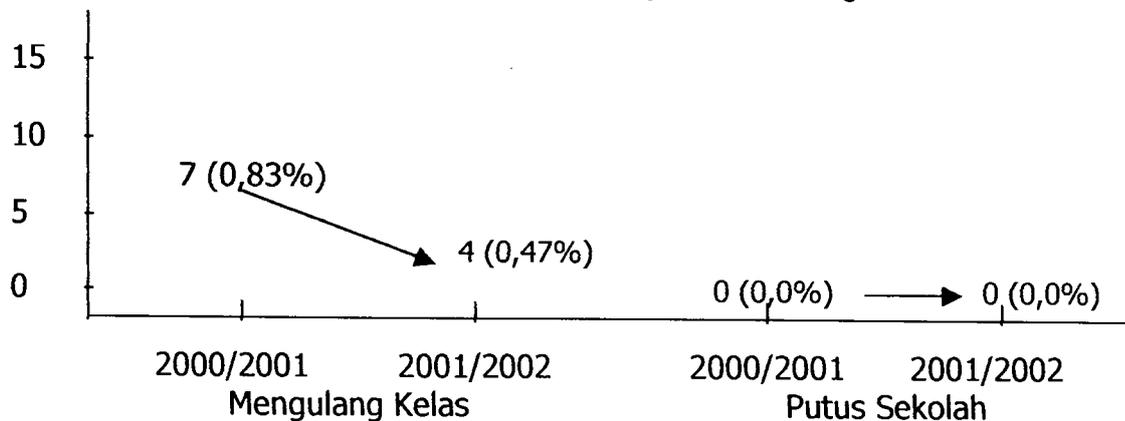
Program kerja yang telah direalisasikan SLTP Santo Aloysius sama halnya dengan SLTP BPI I antara lain: (1) program gairah belajar, (2) program mengulang kelas, (3) program putus sekolah, dan (4) program ramah lingkungan, memberikan arti dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dipahami bahwa pelaksanaan program tersebut bukan saja menjawab kebutuhan wajib belajar melainkan mengandung makna ganda meningkat NEM siswa diketahui dari hasil NEM masuk. Kemudian membantu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dengan mengadakan fasilitas dan mengajak anak usia wajib belajar agar bersekolah, kendati sekolah ini khusus dimasuki oleh WNI keturunan dan didominasi oleh kelompok non muslim. Dalam kaitan ini dijelaskan Soeweno (1990 : 1) bahwa sekolah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program wajib belajar apabila sekolah tersebut dijadikan wadah menampung anak usia 13-15 Th dengan menyediakan fasilitas dan program-program yang menyentuh kepentingan persoalan kewajiban belajar.

Kepala sekolah yang sangat serius memperhatikan anak-anak yang dikategorikan belajar lamban, motivasi rendah serta penyebab lain yang berpengaruh bagi persoalan tinggal kelas dan putus sekolah dimulai dengan menyediakan fasilitas agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan telah

memberikan suasana demokrasi bagi setiap anak. Strategi ini sesuai dengan Hasil Konvensi Hak-Hak Anak (Majelis Umum PBB tanggal 20 Nopember 1989) seperti dijelaskan bahwa PBB menyatakan kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus yang didasari atas pelayanan demokrasi. Menurut analisis ini, terdapat hubungan yang signifikan antara pelayanan program program wajib belajar yang efektif dengan peningkatan NEM siswa, setidaknya ditemukan penurunan persentase anak mengulang kelas.

Gambar 8

Persentase Mengulang Kelas dan Putus Sekolah
Siswa SLTP Santo Aloysius Bandung



Sumber : Analisis Peneliti, 2002

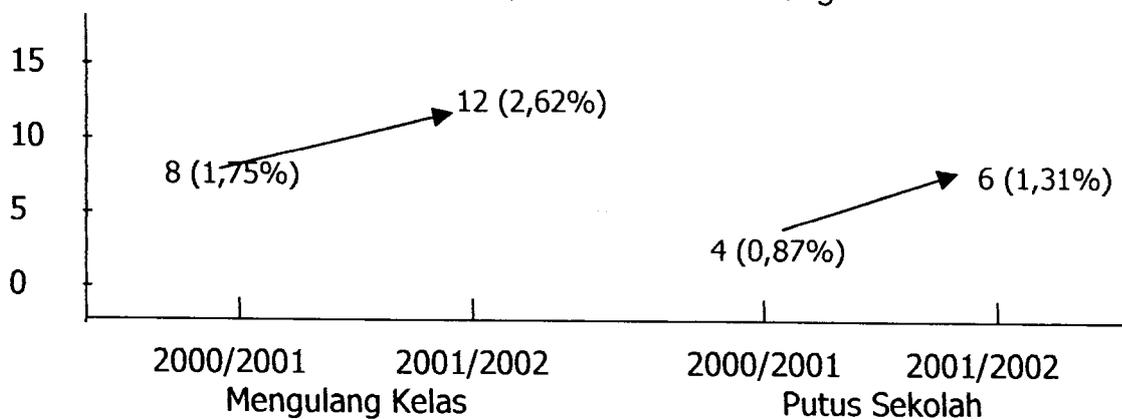
Efektivitas pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di sekolah ini membawa dampak terhadap peningkatan NEM siswa, seperti dari hasil analisis efisiensi pada awal masuk sekolah rata-rata NEM sebesar 36,00 atau 6,0 setelah mereka lulus ternyata menjadi 45,00 atau 7,5. Nilai yang diperoleh cukup bervariasi mulai dari 30,00 atau 5,0 sampai dengan 50,00 atau 8,33. Jumlah yang dicapai tersebut harus ditingkat atau setidaknya

dipertahankan untuk tahun yang akan datang, karena peluang untuk mencapai harapan terbuka lebar disebabkan dana sekolah sangat memadai.

SLTP Pasundan II dipimpin seorang kepala sekolah memulai program wajib belajar pendidikan dasar yang diarahkan pada tiga kegiatan pokok yakni gairah belajar, mengulang kelas dan putus sekolah. Akan tetapi seperti diungkapkan pada bagian muka bahwa pelaksanaan operasional mengalami kendala teknis seperti keterbatasan dana yang berdampak masih banyaknya anak tinggal dan putus sekolah.

Gambar 9

Persentase Mengulang Kelas dan Putus Sekolah
Siswa SLTP Pasundan II Bandung



Sumber: Hasil analisis peneliti, 2002

Partisipasi kepala SLTP Pasundan II yang dinilai belum efektif disebabkan banyak antara lain: (1) kegiatan wajib belajar hanya menjalankan program tahun sebelumnya, kendati hal itu difokuskan bagi peningkatan gairah belajar, mencegah anak tinggal kelas dan putus sekolah. Sesungguhnya Mark L. Goldstein (Timpe, 1992) sejak lama menyarankan dan

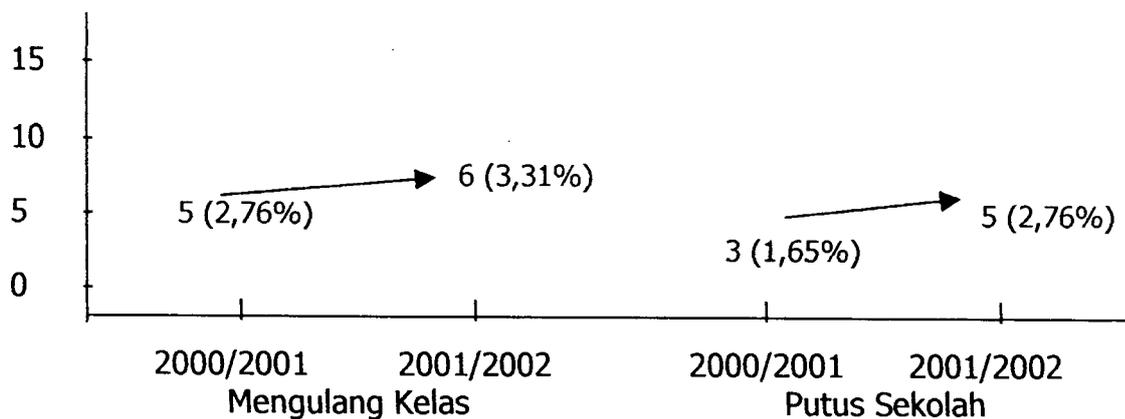
studi yang dilakukannya bahwa salah satu tolok ukur partisipasi yang efektif adalah kadar partisipasi karyawan dalam meningkatkan produk-produk baru. Konotasi dari produk baru dialihkan dalam bidang kependidikan yakni menurunnya atau hilang sama sekali angka mengulang kelas dan putus sekolah di sekolah-sekolah tersebut. Dalam kenyataannya, dua masalah berat ini mengalami kenaikan cukup berarti di SLTP Pasundan II, (2) pergantian guru honor dalam frekwensi yang cukup tinggi sehingga realisasi program wajib belajar tersendat-sendat atau bahkan sempat terhenti. Gibson Cs (1994 : 249) menyebutkan bahwa strategi mengikutsertakan pegawai secara rutinitas dan berkesinambungan merupakan prasyarat keberhasilan program.

Pada SLTP Yos Sudarso yang dikenal penuh disiplin bernuansa salib sudi diselingi model kepemimpinan militeristik, menempatkan kepala sekolah sebagai orang pertama melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar mengalami banyak hambatan. Berdasarkan kenyataan lapangan maka pelaksanaan program wajib belajar di sekolah ini belum efektif. Alasan mendasar antara lain: (1) disiplin kaku menyebabkan anak-anak lebih memilih sekolah lain, sehingga terjadi grafik perpindahan yang cukup memprihatinkan, Padahal menurut Soewono (1990 : 1) ditegaskan bahwa pelaksanaan program wajib belajar yang efektif diketahui dari proses mengajak anak-anak (13-15 Th) untuk tetap bersekolah. Bila terjadi angka perpindahan cukup tinggi diprediksi akan mengalami dua hal: *Pertama*, anak-anak tetap bersekolah karena sekolah yang dituju sesuai dengan harapan. *Kedua*, anak-anak tidak lagi berminat untuk

bersekolah karena trauma dengan sistem persekolahan sebelumnya atau sekolah yang diminati memiliki persyaratan yang amat ketat.

Berikut ini dikemukakan persentase angka mengulang kelas dan putus sekolah sebagai bukti belum efektifnya sekolah ini melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tingkat SLTP.

Gambar 10
Persentase Mengulang Kelas dan Putus Sekolah
Siswa SLTP Yos Sudarso Bandung



Sumber : Hasil analisis peneliti, 2002

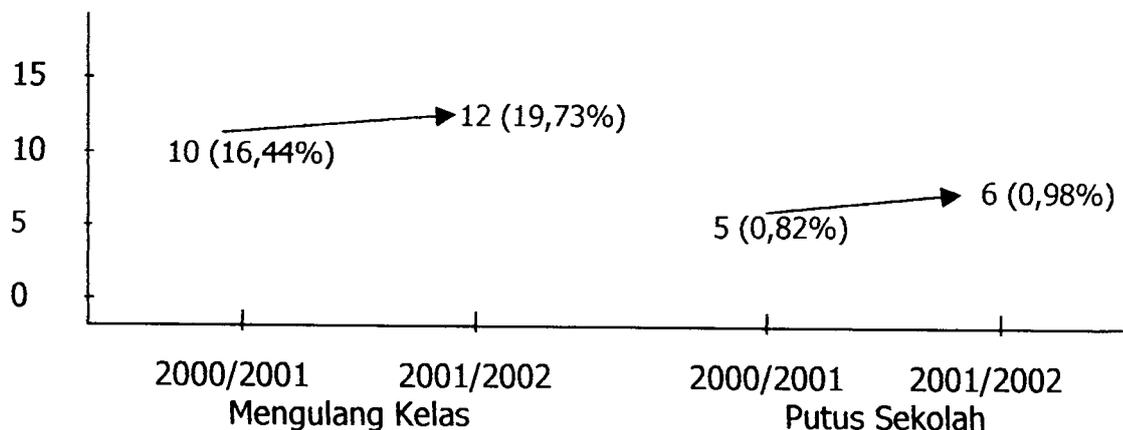
Selanjutnya SLTP YAS Bandung yang mendapat sorotan tentang kinerja partisipasi kepala sekolah yang dinilai belum efektif, namun diprediksikan akan membaik dalam dua tahun kedepan, karena sekolah ini menghabiskan cukup banyak dana untuk promosi. Tahun pelajaran 2002/2002 saja berhasil merekrut siswa cukup banyak yakni 608 orang. Angka ini dikategorikan banyak dibanding sekolah swasta lainnya yang nota bene hidup antara pagi dan sore.

Ketidakefektifan partisipasi kepala sekolah dilihat dari berbagai aspek yang menurut harapan program kerja dan landasan teori membuka peluang terjadinya bias. *Pertama*, manajemen keuangan yang belum profesional, kendati dana dikategorikan “banyak masuk” terutama bersumber dari siswa, namun pengalokasian untuk kepentingan program wajib belajar sangat prihatin. Depdiknas (2001 : 3) dalam pandangan makro menjelaskan bahwa ekonomi yang memadai memegang andil cukup besar dalam penuntasan wajib belajar. Bila konsisten dengan pernyataan ini, maka pengalokasikan dana yang sangat terbatas untuk menuntaskan masalah wajib belajar tetap menjadi kalsik. *Kedua*, di samping ketat pengeluaran dana untuk menuntaskan masalah mengulang kelas dan putus sekolah, pembangunan ruang kelas baru (RKB)-pun belum segenyar sekolah lain seperti SLTP BPI I dan SLTP Santo Aloysius. Supyan Nur Yahya (1998 : 6) menyarankan agar anak usia 13-15 Th dapat ditampung di SLTP, membuka peluang bagi SLTP Swasta untuk menambah ruang kelas baru sebagai bentuk kepedulian terhadap wajib belajar. Dalam hal ini kepala sekolah tentunya mampu memberikan argumentasi positif kepada pihak yayasan untuk membaca peluang strategis ini. Artinya di sini ada peluang di samping alasan kemanusiaan juga berlapis bisnis.

Partisipasi kepala sekolah yang membutuhkan perhatian serius untuk dibenahi lebih lanjut dan perlunya pengembangan kemampuan profesional, karena dilihat dari hasil yang dicapai belum sebanding nama besar sekolah yang berhasil menggaet anak dalam jumlah yang besar.

Gambar 11

Persentase Mengulang Kelas dan Putus Sekolah
Siswa SLTP YAS Bandung



Sumber : Hasil analisis peneliti, 2002

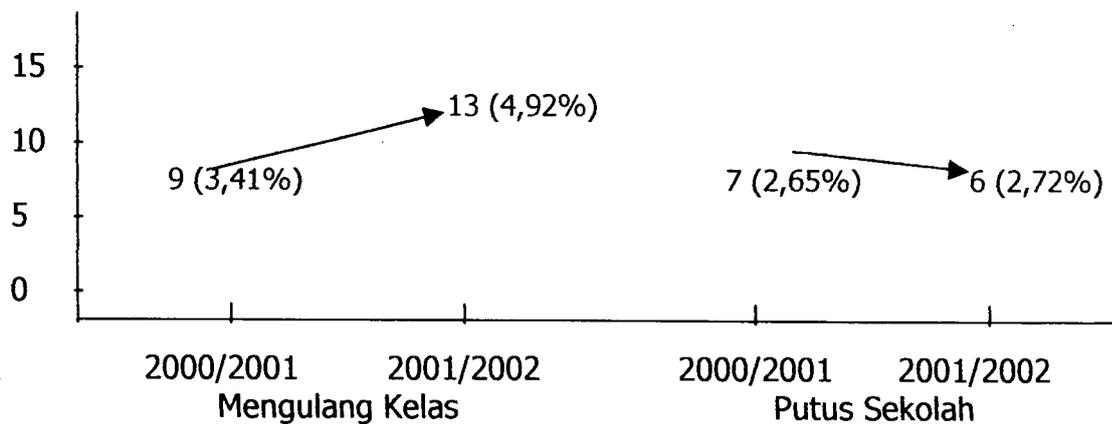
Kinerja terakhir yang dianalisis dalam kelompok ini adalah partisipasi kepala SLTP Pelita Bandung yang menurut penilaian belum efektif berdasarkan beberapa alasan utama antara lain:

1. Tidak disediakan anggaran untuk mengatasi masalah mengulang kelas dan putus sekolah, sementara program wajib belajar masih menggunakan program tahun lalu menyebabkan penilaian terhadap partisipasi kepala sekolah hanya mengamankan posisi lembaga pendidikan. Padahal angka mengulang kelas dan putus sekolah cukup tinggi dan peserta yang berminat masuk sekolah dibatas sebagai dampak dari keterbatasan ruang belajar. Ali Imron (1996 : 82) sempat mengatakan bahwa partisipasi kepala sekolah yang efektif dalam implemetasi kebijakan ditentukan tingkat terlayannya kepentingan masyarakat. Bila kebutuhan sekolah anak usia 13-15 tahun saja

tidak mampu dilayani berarti kinerja kepala sekolah tersebut kurang progresif dalam mengelola sekolah, terutama memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi atas.

2. Rekrutmen tenaga honorer bagi guru mata pelajaran sebagai solusi mengatasi kekurangan guru, seharusnya turut membantu pencapaian target wajib belajar. Dalam kenyataan agenda rekrutmen yang belum sesuai spesifikasi disiplin ilmu dan jenjang seharusnya menyebabkan pelaksanaan tugas semata-mata menjawab kebutuhan mengajar, belum menjawab persoalan utama seperti mengatasi anak tinggal kelas dan putus sekolah. Konsekuensi lain dari rekrutmen yang keliru menimbulkan konflik internal yang membawa dampak bagi kelancaran proses belajar mengajar. Darmaningtiyas (1999 : 31-32) menjelaskan bahwa penurunan partisipasi disebabkan adanya konflik dan salah satu sumber konflik justru perekrutan karyawan yang menimpang dari rencana.
3. Rata-rata NEM yang mengalami peningkatan belum berarti dibanding sekolah lain, seperti dibuktikan dari rata-rata NEM masuk siswa sebesar 27,00 (4,5) naik menjadi 30,00 (5,0). Kendati terlihat adanya kenaikan, namun bila dilihat dari standarisasi Departemen Pendidikan Nasional yakni 6,00, maka angka yang ditampilkan dalam rata-rata NEM sekolah ini masih membutuhkan pembinaan intensif lebih lanjut, terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan pengajaran melalui kegiatan belajar tambahan atau penyediaan fasilitas dan subsidi insentif lainnya.

Gambar 12
 Persentase Mengulang Kelas dan Putus Sekolah
 Siswa SLTP Pelita Bandung



Sumber : Hasil analisis peneliti, 2002

C. Analisis SWOT tentang Efektivitas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat SLTP di SLTP Swasta

Pada bagian ini akan dilakukan analisis menggunakan pendekatan SWOT untuk menentukan efektivitas pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di SLTP Swasta Kota Bandung berdasarkan studi lapangan. Gambar 13 berikut dikemukakan format analisis berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sekaligus mengungkapkan peluang dan tantangan. Dari keempat aspek tersebut ditetapkan strategi yang memiliki tujuan untuk menjawab masalah-masalah berkaitan dengan kekuatan dan peluang, kelemahan dan peluang, serta kekuatan dan tantangan ataupun strategi dalam mengatasi masalah kelemahan dan tantangan.



Kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan dimaksud adalah aplikasi wajib belajar yang dilaksanakan oleh pihak pengelola sekolah dan penyelenggara dengan memaksimalkan potensi yang tersedia di sekolah seperti di SLTP BPI I, SLTP Santo Aloysius I, SLTP Pasundan II, SLTP Yos Sudarso, SLTP YAS, SLTP Pelita maupun potensi masyarakat sekitar.

Gambar 13

Analisis Partisipasi Pihak Yayasan dan Kepala SLTP Swasta dalam Program Wajar Dikdas yang Menggunakan Pendekatan SWOT

INTERNAL	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Pendidikan berdiri berdasarkan ketentuan hukum 2. Tersedia dana pendidikan melalui iuran siswa dan DBO 3. Tingkat pengamalan kerja kepala sekolah dan penyelenggara yayasan relatif tinggi disertai pendidikan memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program wajib belajar yang disusun belum menjawab masalah anak tinggal kelas dan DO 2. Manajemen kepala sekolah belum profesional 3. Sistem rekrutmen guru hanya menjawab persoalan kekuarangan Belum kualitas.
OPPORTUNIES (O)	<i>STRATEGI SO</i>	<i>STRATEGI WO</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah semakin mendekati arus birokrasi kependidikan 2. Penerapan konsep MBS membantu sekolah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 3. Sikap masyarakat yang selektif dalam memilih sekolah bagi anak-anaknya (sekolah bermutu) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan landasan yuridis yayasan SLTP Swasta untuk merebut peluang mutu dalam era otonomi daerah. 2. Memanfaatkan dana untuk merealisasikan MBS 3. Memanfaatkan pengalaman dan pendidikan untuk menjawab sikap selektif terhadap mutu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program wajib belajar dengan baik untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah. 2. Meningkatkan profesionalisasi manajemen kepala sekolah untuk merealisasikan MBS 3. Merekrut guru yang berkualitas untuk memenuhi sikap selektif dlm memilih pendidikan bermutu
TREATHS (T)	<i>STRATEGI ST</i>	<i>STRATEGI WT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Intervensi pihak yayasan dalam kegiatan pengajaran, termasuk mengalokasikan dana wajib belajar yang tidak memadai 2. Angka mengulang kelas dan DO di SLTP Swasta tertentu naik dari tahun ke tahun 3. Nilai akhir siswa masih rendah di SLTP tertentu bahwa masih di bawah standar Depdiknas (6,0). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan landasan hukum yayasan untuk meminimalkan intervensi yayasan terhadap operasionalisasi pendidikan. 2. Memanfaatkan dana yayasan secara optimal guna mengatasi masalah mengulang kelas dan putus sekolah 3. Memanfaatkan pengalaman dan pendidikan untuk meningkatkan nilai siswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program yang baik untuk mengurangi intervensi pihak yayasan 2. Profesional dalam melaksanakan manajemen sekolah untuk mengatasi masalah mengulang kelas dan putus sekolah. 3. Memperbaiki sistem rekrut guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang membawa dampak dalam meningkatkan nilai siswa

Apa yang dituangkan dalam gambar di atas merupakan realita yang dihadapi SLTP Swasta Kota Bandung dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Di sana terdapat strategi untuk mengatasi masalah Wajar dan akan dipaparkan pada halaman berikut.

1. Kekuatan SLTP Swasta Kota Bandung melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Seperti terbaca dalam gambar 13, kekuatan SLTP Swasta Kota Bandung dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun cukup banyak diantaranya adalah: 1) Setiap SLTP Swasta memiliki yayasan legal, karena didirikan atas ketentuan hukum. Menurut UU. No. 16/2001 dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya yayasan dapat mendirikan badan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

2) Tersedia dana pendidikan yang bersumber dari iuran siswa dan dari DBO. Sumber dana berasal dari siswa merupakan potensi yang harus digali dengan pertimbangan tidak memberatkan siswa, bila kondisi ini dibiarkan berlarut akan sangat rentan bagi anak putus sekolah. Seperti dilakukan SLTP BPI I, SLTP Santo Aloysius dan SLTP YAS Bandung yang sangat peduli

terhadap tingkat kemampuan anak membayar iuran sekolah menetapkan perbedaan bagi anak-anak kurang mampu dengan menetapkan persyaratan tertentu. Dana DBO lainnya yang disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara baik untuk menunjang kegiatan pengajaran di sekolah, termasuk dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar.

3) Tingkat pengalaman kerja dan pendidikan pengelola (kepala sekolah) serta penyelenggara (ketua yayasan) SLTP Swasta Kota Bandung relatif tinggi dan memadai dan dapat dijadikan kekuatan utama dalam melaksanakan program wajib belajar di sekolah masing-masing. Masa kerja kepala sekolah berkisar antara 3 s/d 11 Tahun dan ketua yayasan antara 7 s/d 21 Tahun merupakan potensi yang harus dimanfaatkan dalam merealisasikan program tersebut. Sementara itu latar belakang pendidikan kepala sekolah cukup beragam mulai dari jenjang S1 s/d S2, baik relevan dengan tugas seperti sarjana pendidikan maupun sedikit menyimpang yakni sarjana ekonomi adalah kekuatan organisasi sekolah.

2. Kelemahan SLTP Swasta Kota Bandung melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Kelemahan yang diketahui dari temuan lapangan meliputi: 1) Program sekolah yang disusun oleh setiap sekolah, ternyata tidak semua SLTP Swasta yang menjawab permasalahan wajib belajar yang berkaitan dengan upaya mengurangi angka tinggal kelas dan putus sekolah. Program kerja merupakan wujud dari suatu rencana sekolah yang disusun dengan mempertimbangkan

potensi sekolah serta menjawab kebutuhan. Oleh karena itu harus dimulai dari analisis kebutuhan organisasi yang menyangkut hajat sekolah, tenaga kependidikan, siswa dan masyarakat sekitar.

2) Manajemen kepala sekolah yang belum profesional menyebabkan timbulnya konflik internal antar personil sekolah, terutama berkaitan dengan penempatan, fungsi dan tanggung jawab. Diketahui dari nuansa politis ini yang menyebabkan konflik tersebut pada dasarnya bukan saja berkaitan dengan pengembangan karir namun telah bercampur imbalan. Manajemen yang baik tentu menempatkan seseorang sesuai tempat, baik dilihat dari kemampuan maupun faktor relevansi dan komitmen lainnya. Bila dipandang perlu segera diadakan test kelayakan dan kepatutan.

3) Sistem rekrutmen guru hanya menjawab persoalan kekurangan dan belum berorientasi kualitas. SLTP Swasta tertentu di Kota Bandung ternyata merekrut guru honorer dalam rangka menjawab kekurangan guru secara matematis, terutama difungsikan sebagai tenaga pengajar pada mata pelajaran tertentu. Sepatutnya sekolah melakukan rekrutmen guru yang mengacu kepada kualitas dilihat dari prestasi akademis (IPK) atau standarisasi pendidikan untuk level guru SLTP, yakni S1 (sarjana pendidikan).

3. Peluang SLTP Swasta Kota Bandung melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang Efektif.

Peluang yang dapat dicapai untuk mewujudkan pelaksanaan program wajib belajar secara efektif antara lain: 1) Implementasi kebijakan otonomi

daerah yang mempersempit ruang gerak arus birokrasi kependidikan menekankan peran pemerintah kabupaten/kota sebagai pengelola dalam berbagai aspek yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Peluang ini semestinya mampu dibaca sekolah swasta, karena kompetisi merebut siswa pada era ini mirip seperti perang.

2) Penerapan konsep MBS ternyata membantu sekolah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. MBS merupakan salah satu strategi yang bertujuan untuk membangun suatu sistem persekolahan yang mampu memberikan kemampuan dasar (basic skill) guna menjawab tuntutan siswa. Sekolah harus menyiapkan diri dalam upaya memiliki kemandirian secara ekonomi serta keunggulan sebagai kebanggaan institusi. Oleh karena itu, strategi MBS harus lebih menekankan kepada elemen manajemen partisipatif dengan memunculkan permukaan aspek-aspek seperti kemampuan, informasi dan imbalan yang memadai sebagai elemen yang sangat menentukan efektivitas program dalam meningkatkan kinerja sekolah. Dengan demikian sekolah memiliki otonomi untuk mengelola sendiri dan memberdayakan masyarakat dalam partisipasi kepemilikan.

3) Sikap masyarakat yang selektif dalam memilih sekolah bagi anak-anaknya. Pergeseran paradigma di sebagian masyarakat yang semula "enggan" menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan klasik menjadi "selektif" memilih sekolah berdasarkan harapan dan mutu menjadi bagian yang tidak dapat dielakan dalam era ini. Peluang ini harus cepat dibaca oleh pihak sekolah

untuk merekrut siswa sebagai sasaran kebijakannya. Tidak mudah memang, sebab sekolah harus menyiapkan diri dengan berbagai persyaratan seperti penyediaan fasilitas belajar, tenaga pengajar profesional atau menyediakan dana yang memadai. Sekolah yang telah dianggap siap dalam segala aspek niscaya akan memenangkan kompetisi ini.

4. Ancaman bagi dalam SLTP Swasta Kota Bandung melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang Efektif

Ancaman yang muncul dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di SLTP Swasta Kota Bandung meliputi: 1) Intervensi pihak yayasan yang berlebihan dalam kegiatan operasional sekolah, sehingga kegiatan pengajaran dan wajib belajar-pun harus mengikuti ketentuan pihak yayasan. Intervensi ini menyebabkan otonomi sekolah, otonomi manajemen dan otonomi guru terbelenggu dalam melakukan aktivitas ataupun inovasi-inovasi metode dan manajemen sekolah. Kekakuan ini menyebabkan sekolah swasta tetap saja dijadikan sekolah pelengkap yang menempatkan pada urutan dua ke atas dalam pilihan sekolah masyarakat. Memang ada sebagian sekolah swasta yang maju, setelah diketahui ternyata yayasan mengubah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pihak sekolah.

2) Angka mengulang kelas dan putus sekolah di SLTP Swasta relatif tinggi dan ditemukan pada sekolah-sekolah tertentu berada dalam posisi bahaya

serius, bila tidak diatasi dengan segera tetap saja menjadi ancaman dalam mencapai target wajib belajar Kota Bandung. Mengulang kelas dan putus sekolah dua masalah klasik dalam bingkai wajib belajar, sedangkan masalah anak tidak melanjutnya studinya ke tingkat yang lebih tinggi, seperti dari SD ke SLTP merupakan bagian dari masalah ini, namun dalam kenyataan di lapangan selalu diabaikan oleh pihak sekolah.

Dari sejumlah kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman sebagaimana dipaparkan pada halaman sebelumnya diberikan solusi dengan strategi yang menggunakan pendekatan SWOT sebagai berikut:

STRATEGI SO, disusun dalam kaitan dengan memberdayakan kekuatan dan mengejar peluang. Pada bagian ini dimunculkan 3 (tiga) strategi yakni: (1) memanfaatkan landasan yuridis yayasan dan sekolah untuk merebut peluang siswa dalam era otonomi daerah. Artinya pergeseran kebijakan pemerintah akan menyentak sekolah sebagai institusi mandiri dalam mengelola diri dan merebut pasar dengan membenahi sekolah menjadi sekolah bermutu. Sebenarnya bila sekolah swasta tidak cengeng dan tetap seperti tujuan semula sebagai mitra pemerintah membantu untuk menuntaskan program wajib belajar, maka otonomi daerah akan memberikan keluasan yang lebih jauh dari era orde baru yang dialami selama ini, (2) memanfaatkan dana pendidikan untuk merealisasikan program MBS. Dana pendidikan yang digali dari berbagai sumber merupakan kekuatan internal sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh yayasan dan sekolah untuk mewujudkan sekolah mandiri. Bila sejajar

kepentingan kemanusiaan dan bisnis merupakan dua kebutuhan kompetitif yang akan mampu meningkatkan citra diri sekolah, (3) memanfaatkan pengalaman kerja dan pendidikan yang dimiliki pihak yayasan dan sekolah untuk menjawab sikap selektif masyarakat dalam memilih sekolah yang bermutu. Potensi keunggulan internal ini seyogyanya dimanfaatkan dengan baik dalam memaju pertumbuhan dan perkembangan sekolah.

STRATEGI WO, merupakan jawaban untuk meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang dengan strategi antara lain: (1) menyusun program wajib belajar berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan kebutuhan siswa dengan memanfaatkan peluang kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang akan memberikan peluang untuk mewujudkan sekolah mandiri perlu dimanfaatkan dengan memberdayakan tenaga ahli baik tenaga internal maupun dengan melibatkan perguruan tinggi dalam rangka menyusun program sekolah, khususnya program-program yang memuat agenda mengatasi masalah mengulang kelas, putus sekolah dan mewujudkan gairah belajar di kalangan siswa SLTP Swasta.

Strategi WO (2) meningkatkan kadar profesionalitas manajemen kepala sekolah untuk merealisasikan program MBS, sebab dalam konsep MBS sebenarnya terkandung upaya untuk menciptakan sistem pelayanan pendidikan yang profesional melalui manajemen sekolah. Kepala sekolah dan pihak yayasan harus merubah paradigma dari biasanya otoriter menjadi demokrasi dalam koridor kemandirian sekolah. SLTP Swasta sebenarnya telah

merealisasikan konsep otonomi sekolah, namun otonomi selama ini belum optimal, karena intervensi yayasan dan pemerintah membuat sekolah swasta seperti “bebek yang harus digembalakan setiap saat”.

Strategi WO (3) merekrut guru yang berkualitas untuk memenuhi sikap selektif dalam memilih lembaga pendidikan yang bermutu merupakan jawaban atas kelemahan manajemen sekolah dan ancaman dari pihak masyarakat yang akan meninggalkan sekolah tersebut. Sistem rekrut harus diperbaiki dengan mengarahkannya pada kualitas, relevansi, dan komitmen membangun organisasi. Rekrutmen guru berstatus tetap dan honorer selama dengan prinsip menjawab jumlah secara matematis, perlu digeser dengan merekrut guru yang profesional dilihat dari prestasi akademis dan tingkat pengamalan yang ditandai dengan bukti otentik ijazah sarjana ke atas serta surat keterangan lainnya.

STRATEGI ST, adalah upaya untuk memaksimalkan pemberdayaan kekuatan sekolah untuk dimanfaatkan dalam peluang kebijakan otonomi daerah. Secara operasional strategi dimaksud meliputi: (1) memanfaatkan yayasan dan lembaga SLTP Swasta yang telah dilegitimasi pemerintah untuk mampu meminimalkan intervensi pihak yayasan dalam kegiatan operasional sekolah. Yayasan yang mengklaim kapling profesional merupakan bentuk ancaman serius mewujudkan otonomi profesional dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya. Kewenangan dalam meningkatkan mutu sekolah sudah seharusnya diberikan kepada pihak sekolah, sedangkan upaya mengembangkan sekolah adalah kapling tugas yayasan, (2) memanfaatkan dana pendidikan yang

disediakan yayasan dan pemerintah untuk mengatasi masalah krusial tinggal kelas dan putus sekolah. Dana pendidikan bersumber dari siswa merupakan sumber bulanan sekolah ditunjang oleh dana pemerintah yakni DBO membutuhkan pengelolaan yang efektif dengan mengalokasikan secara tepat serta menggunakan seefisien mungkin. Seperti SLTP BPI dan SLTP Santo Aloysius I yang menggunakan dana secara baik berhasil menghapus angka putus sekolah dan memperkecil angka mengulang kelas. Kenapa SLTP Swasta lainnya belum mengikuti pola yang diterapkan di sekolah-sekolah tersebut, (3) memanfaatkan pengalaman kerja dan tingkat pendidikan yang dimiliki kepala sekolah dan pihak yayasan untuk meningkatkan nilai akhir siswa, baik siswa kelas I, II maupun rata-rata siswa kelas III. Rata-rata nilai yang masih di bawah standar 6,0 merupakan kondisi yang memprihatinkan kita semua, karena saat ini masyarakat Indonesia dan bahkan dunia sedang meniupkan angin globalisasi membutuhkan SDM berkualitas dan kompetisi global itu jelas akan dimenangkan oleh SDM yang profesional dan memiliki keahlian sesuai dengan bidang masing-masing.

STRATEGI WT, dimaksudkan untuk meminimalkan kelemahan manajemen sekolah guna mengatasi ancaman terhadap pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di SLTP Swasta. Secara operasional strategi yang diwujudkan tersebut mencakup: 1) Menyusun program rasional untuk mengatasi intervensi pihak yayasan yang menjadi kebutuhan otoritasnya sejak bertahun-tahun. Strategi ini dimulai dari melakukan analisis

kebutuhan sekolah secara umum yang selanjutnya dirinci menjadi kebutuhan teknis seperti menjawab persoalan anak tinggal kelas, putus sekolah ataupun rata-rata nilai akhir siswa yang masih jauh dari standar Depdiknas. Di samping itu, melalui program yang penuh pertimbangan dalam bingkai meningkatkan mutu sekolah merupakan upaya untuk mengurangi campur tangan pihak yayasan dalam kegiatan pengajaran.

2) Profesional dalam melaksanakan manajemen sekolah memberikan jawaban untuk mengatasi masalah mengulang kelas dan putus sekolah. Kegiatan riil yang dapat dilakukan antara lain dengan menempatkan guru profesional sesuai dengan keahlian masing-masing sebagai guru bidang studi, wali kelas, tenaga UKS, tenaga BP ataupun sebagai pengelola operasional program wajib belajar. Anak tinggal kelas dan putus sekolah diakui sebagai masalah klasik yang ada setelah pendidikan formal menjadi kebutuhan masyarakat; tentunya pihak sekolah harus melakukan antisipasi kemungkinan terburuk dari fenomena ini dengan memberitahukan kepada seluruh komponen sekolah bahwa kondisi ini akan mengancam lembaga SLTP.

3) Memperbaiki sistem rekrut guru dengan memilih guru-guru profesional untuk meningkatkan nilai siswa. Strategi ini dilakukan dengan paket penyusunan format rekrut berdasarkan tes kelayakan dan kepatutan. Layak dilihat dari performance dan keterampilan mengajar dan yang diukur adalah kemampuan profesional dan tingkat ijazah. Untuk SLTP sebaiknya ditetapkan standar sarjana (S1). Sedangkan kepatutan dilihat dari kewenangan mengajar seperti telah

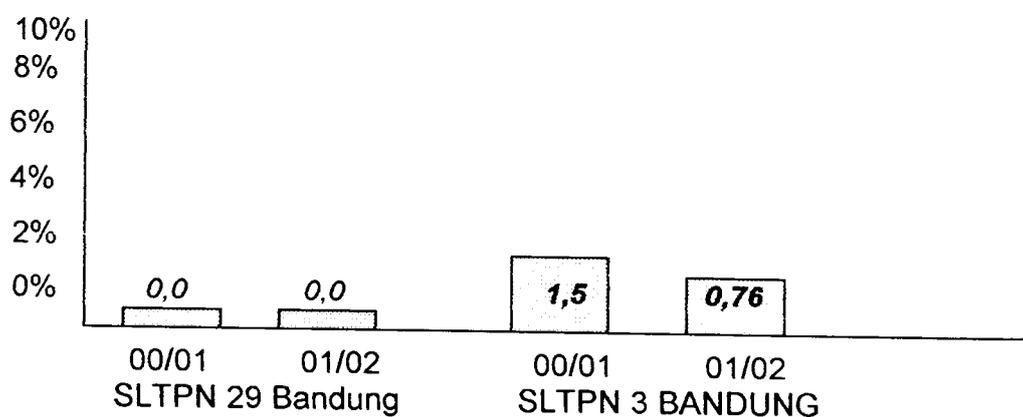
mengantongi akta mengajar atau bukti sebagai tenaga pengajar di suatu lembaga pendidikan atau sebagai guru honor. Dari strategi tersebut, sekolah akan memiliki guru profesional yang akan mengamalkan bhaktinya untuk tugas kemanusiaan serta berjuang meningkatkan mutu siswa.

D. Efektivitas Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di SLTP Negeri Kota Bandung

Mencermati angka mengulang kelas pada dua SLTP Negeri Kota Bandung seperti digambarkan pada temuan penelitian di atas, dapat dibaca bahwa pada sekolah yang berorientasi mutu, ternyata angka mengulang kelas relatif tinggi. Sekolah adalah SLTP Negeri 3 yang dikategorikan sekolah pusat kota. Berbeda dengan SLTP Negeri 29 Bandung yang menerapkan sistem semua anak harus naik kelas.

Diagram 3

Persentase Siswa Mengulang Kelas di SLTP Negeri Kota Bandung Tahun 2000/2001 s/d 2001/2002.

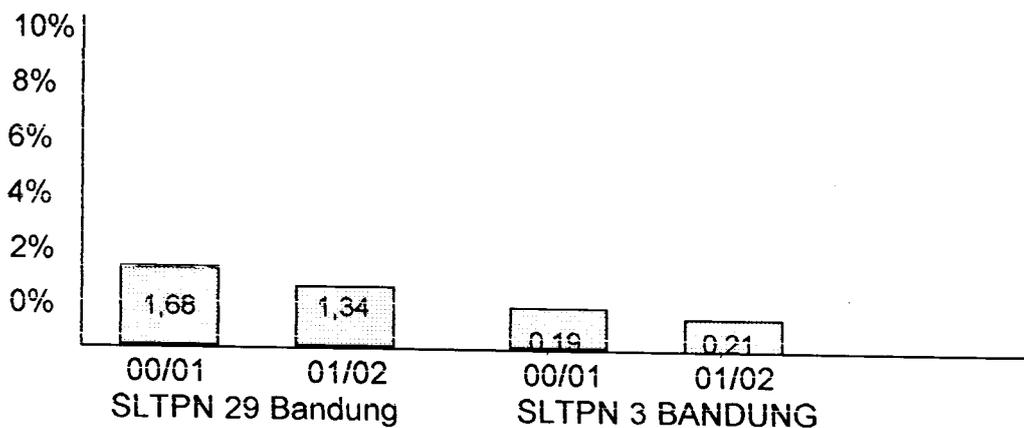


Sumber: Hasil analisis peneliti, 2002

Dari diagram 3 dapat dibaca bahwa SLTP Negeri 3 yang berada di Pusat Kota Bandung terdapat anak mengulang kelas pada tahun 2000/2001 sebesar 1,5%, sedangkan pada tahun berikutnya (2001/2002) terdapat angka mengulang kelas sebesar 0,76%. Mencermati angka tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan sekolah yang menekan angka mengulang kelas memberikan dampak positif dalam rangka mengatasi masalah masalah wajib belajar. Akan tetapi secara simultan menjawab kebutuhan pendidikan bermutu. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat analisis putus sekolah dari 2 (dua) sekolah yang dipaparkan tersebut.

Diagram 4

Persentase Siswa Putus Sekolah di SLTP Negeri Kota Bandung Tahun 2000/2001 s/d 2001/2002.



Sumber: Hasil analisis peneliti, 2002

Setelah menghitung secara matematis persentase putus sekolah siswa SLTP Negeri Kota Bandung, dapat dimaknai bahwa angka putus sekolah SLTP Negeri 29 Bandung relatif besar dibandingkan dengan SLTP Negeri 3 Kota

Bandung. Diawal telah diprediksi bahwa tingginya angka putus sekolah disebabkan tingkat pendidikan orang tua yang relatif rendah membawa konsekuensi terhadap pendidikan anak. Kondisi ini semakin diperparah oleh tingkat ekonomi yang relatif rendah dengan penghasilan “dapat pagi habis sore” karena mayoritas sebagai tenaga kerja kasar seperti buruh bangunan dan pedagang kaki lima (PKL) yang sudah barang tentu tidak menetap.

Sementara dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 463/SK.1860-Binsos/1996 tentang pembentukan pengurus daerah lembaga gerakan nasional orang tua asuh Propinsi Jawa Barat mengupayakan agar setiap sekolah (termasuk SLTP Negeri) harus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat agar bersedia menjadi orang tua asuh. Moment seperti harus ditangkap kepala sekolah setempat untuk melaporkan kondisi riil siswa sekolah sehingga GN-OTA dapat menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa yang tidak mampu dalam ekonomi dan apabila dibiarkan berlarut akan mempengaruhi anak tersebut untuk putus sekolah.

E. Analisis Perbandingan kualitatif Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun antara SLTP Swasta dan SLTP Negeri

Bila diteliti lebih jauh untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program wajib belajar yang dilihat dari partisipasi SLTP Swasta dan SLTP Negeri, terutama keunggulan dalam mengatasi dua masalah pokok wajib belajar

seperti mengulang kelas dan putus sekolah, maka perbandingan secara kualitatif dapat dilakukan setelah mengetahui persentase pada sekolah-sekolah tersebut.

Jika dilihat tahun pelajaran 2000/2001, pada SLTP Swasta yang dikategorikan baik memiliki angka mengulang kelas masing-masing SLTP BPI 0,64% dan SLTP Santo Aloysius 0,52%, dan sekolah swasta sedang masing-masing SLTP Pasundan II 1,75%, SLTP Yos Sudarso 2,76%. SLTP YAS Bandung sebesar 16,44% dan SLTP Pelita sebesar 3,41%. Sementara pada SLTP Negeri 29 Bandung yang menerapkan sistem naik kelas 100% tidak ditemukan anak mengulang kelas, dan SLTP Negeri 3 Bandung 1,5% berarti dapat disimpulkan bahwa: "***SLTP Swasta yang dikategorikan baik, termasuk dalam mengatasi masalah mengulang kelas, ternyata lebih baik dibanding sekolah swasta lainnya dan sebagian SLTP negeri.***" Pada SLTP Swasta yang dikategorikan sedang dan kurang baik ternyata sesuai dengan pemberian nilai tersebut.

Dilihat dari tahun pelajaran 2001/2002 pada SLTP Swasta yang dikategorikan baik memiliki angka mengulang kelas masing-masing SLTP BPI 0,52% dan SLTP Santo Aloysius 0,47%, dan sekolah swasta sedang masing-masing SLTP Pasundan II 2,62%, SLTP Yos Sudarso 3,31%. SLTP YAS Bandung sebesar 19,73% dan SLTP Pelita sebesar 4,92%. Sementara pada SLTP Negeri 29 Bandung yang menerapkan sistem naik kelas 100% tidak ditemukan anak mengulang kelas, dan SLTP Negeri 3 Bandung 0,76% berarti

seperti mengulang kelas dan putus sekolah, maka perbandingan secara kualitatif dapat dilakukan setelah mengetahui persentase pada sekolah-sekolah tersebut.

Jika dilihat tahun pelajaran 2000/2001, pada SLTP Swasta yang dikategorikan baik memiliki angka mengulang kelas masing-masing SLTP BPI 0,64% dan SLTP Santo Aloysius 0,52%, dan sekolah swasta sedang masing-masing SLTP Pasundan II 1,75%, SLTP Yos Sudarso 2,76%. SLTP YAS Bandung sebesar 16,44% dan SLTP Pelita sebesar 3,41%. Sementara pada SLTP Negeri 29 Bandung yang menerapkan sistem naik kelas 100% tidak ditemukan anak mengulang kelas, dan SLTP Negeri 3 Bandung 1,5% berarti dapat disimpulkan bahwa: ***“SLTP Swasta yang dikategorikan baik, termasuk dalam mengatasi masalah mengulang kelas, ternyata lebih baik dibanding sekolah swasta lainnya dan sebagian SLTP negeri.”*** Pada SLTP Swasta yang dikategorikan sedang dan kurang baik ternyata sesuai dengan pemberian nilai tersebut.

Dilihat dari tahun pelajaran 2001/2002 pada SLTP Swasta yang dikategorikan baik memiliki angka mengulang kelas masing-masing SLTP BPI 0,52% dan SLTP Santo Aloysius 0,47%, dan sekolah swasta sedang masing-masing SLTP Pasundan II 2,62%, SLTP Yos Sudarso 3,31%. SLTP YAS Bandung sebesar 19,73% dan SLTP Pelita sebesar 4,92%. Sementara pada SLTP Negeri 29 Bandung yang menerapkan sistem naik kelas 100% tidak ditemukan anak mengulang kelas, dan SLTP Negeri 3 Bandung 0,76% berarti

dapat disimpulkan bahwa: ***“SLTP Swasta yang dikategorikan baik, termasuk dalam mengatasi masalah mengulang kelas, ternyata lebih baik dibanding sekolah swasta lainnya dan sebagian SLTP negeri. Kondisi ini sama seperti pada tahun sebelumnya.”***

Bila dilihat dari angka putus sekolah pada tahun pelajaran 2000/2001 seperti pada SLTP Swasta kategori baik (SLTP BPI dengan 0,0%, SLTP Santo Aloysius 0,0%), SLTP Swasta kategori sedang (SLTP Pasundan II, 0,87%, SLTP Yos Sudarso, 1,65%). Sekolah kategori rendah (SLTP YAS Bandung, 0,82%, SLTP Pelita, 2,62%) menunjukkan variasi penurunan yang turut menentukan kualitas sekolah. Sementara pada SLTP Negeri 29 Bandung terdapat angka putus sekolah sebesar 1,68%, dan SLTP Negeri 3 Bandung sebesar 0,19% dapat diberikan penilaian bahwa pada tahun 2000/2001 keberhasilan mengatasi siswa putus sekolah, ternyata lebih ***bagus SLTP Swasta yang dikategorikan baik, dari SLTP Negeri. Akan tetapi SLTP Negeri jauh lebih baik dari SLTP Swasta yang dikategorikan sedang dan berkualitas rendah.***

Pada tahun pelajaran 2001/2002 angka putus sekolah SLTP Swasta kategori baik (SLTP BPI, 0,0%, SLTP Santo Aloysius, 0,0%) untuk kesekian kali membandingkan dengan SLTP Negeri (SLTPN 29 Bandung, 1,34%, SLTPN 3 Bandung, 0,21%) ternyata SLTP Swasta kategori berkualitas lebih baik dari SLTP Negeri. Berdasarkan informasi faktual ini, dapat diyakini bahwa kecenderungan masyarakat yang bergeser untuk memilih pendidikan bermutu, maka lama kelamaan sekolah negeri yang selalu mengabaikan mutu akan

ditinggalkan oleh masyarakat, tentunya sejalan dengan perbaikan status ekonomi masyarakat di tanah air ini. Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa implementasi program wajib belajar merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan mutu dengan menerapkan strategi pemberdayaan semua potensi terkait secara optimal.

Seperti yang ditegaskan sebelumnya bahwa kriteria efektivitas pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di SLTP dalam studi ini, kembali dikemukakan seperti dirumuskan pada paradigma penelitian memuat tentang: *Pertama*, siswa mengulang kelas dan putus sekolah mendekati angka 0%, (2) pelayanan pengajaran di sekolah tersebut dilaksanakan secara baik, kondusif dan sesuai program, (3) kesadaran orang tua semakin meningkat terhadap upaya mendukung pendidikan anaknya.

Berkaitan dengan itu, pada halaman berikut dikemukakan rangkuman hasil penelitian dengan membandingkan antara masalah, teori, temuan lapangan dan pembahasan serta kesimpulan:

Gambar 14
Rangkuman Penelitian

NO	MASALAH	TEORI / KONSEP	STUDI LAPANGAN	KESIMPULAN
1	<p>PARTISIPASI PIHAK YAYASAN SLTP SWASTA KOTA BDG</p> <p>Meliputi: (1) Pemahaman makna (2) sikap kepedulian, (3) bentuk pencegahan, (4) keunggulan, (5) kendala yang dihadapi, dan (6) pendekatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Manajemen 2. Konsep Partisipasi 3. Konsep Wajib Belajar 4. Teori Efektivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang "wajar dikdas" sangat terbatas, terutama SLTP Swasta tertentu; 2. Intervensi terhadap pengajaran sangat tinggi menyebabkan masih banyak siswa mengulang kelas & DO. Artinya sikap kepedulian dan pencegahan masih lemah. 3. Orientasi "bisnis", sehingga keunggulan, kendala dan pendekatan pemecahan masalah "wajar dikdas" menjadi terabaikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Yayasan SLTP Swasta kategori baik, Cukup Efektif. 2. Partisipasi Yayasan SLTP Swasta kategori sedang dan rendah, Belum Efektif.
2	<p>PARTISIPASI KEPALA SLTP SWASTA KOTA BANDUNG dengan substansi idem Idem point 1.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Manajemen 2. Konsep Partisipasi 3. Konsep Wajib Belajar 4. Teori Efektivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang "wajar dikdas" sangat baik, terutama SLTP Swasta kategori baik dan sedang. 2. Otonomi manajemen sekolah "terusik" oleh intervensi Yayasan menyebabkan agenda "wajar" yang disusun terkendala dana, terutama sekolah kategori sedang dan rendah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Kepala SLTP Swasta kategori baik, Cukup Efektif. 2. Partisipasi Kasek (sedang dan kurang) Belum Efektif.
3	<p>PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PARTISIPASI PIHAK SLTPS DAN SLTPN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB DIKDIS 9 TH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Efektivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intervensi yayasan dan orientasi bisnis menghambat otonomi manajemen sekolah di SLTP Swasta, termasuk dalam implementasi program wajar. 2. Ada otonomi sekolah, namun kegiatan wajar bisa terlaksana bila ada honor (imbalan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SLTP Swasta (baik) lebih efektif dari SLTP Negeri kategori sedang dan rendah (pinggiran)

